

**PENGARUH OPINI AUDIT, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA SITUS RESMI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

(Studi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016)

***THE EFFECT OF AUDIT OPINIONS, REGIONAL GOVERNMENT SIZE, AND CAPITAL EXPENDITURE ON THE LEVEL OF INFORMATION DISCLOSURE AT THE OFFICIAL SITE OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF EAST JAVA PROVINCE***

(Study on Local Government in East Java Province 2015-2016)

**Immanuel Antonius Ndoa Ta'a<sup>1</sup>, Dini Wahjoe Hapsari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

[immanuelantonius@students.telkomuniversity.ac.id](mailto:immanuelantonius@students.telkomuniversity.ac.id), [dinihapsari@telkomuniversity.ac.id](mailto:dinihapsari@telkomuniversity.ac.id)

---

## ABSTRAK

Pengembangan situs resmi pemerintah bertujuan supaya masyarakat dapat memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan situs resmi pemerintahnya dengan isi yang selalu di *update*, ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, serta informasi tersebut mudah diakses. Pengungkapan informasi melalui situs resmi pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga terhadap pemerintahan daerah. Daerah di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan untuk membuat menu konten TPAD dalam situs resmi pemerintah daerah, namun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki menu konten tersebut.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal. Variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 42 data yang terdiri dari 21 situs pemerintah daerah dengan waktu dua tahun sebagai sampel dalam penelitian ini. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan menggunakan *software Eviews* versi 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Opini audit, ukuran pemerintah daerah, belanja modal secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci** : Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Tingkat Pengungkapan Informasi keuangan dan non keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah.

---

## ABSTRACT

*The development of official government sites aims to enable communities to gain access to local government information and services. Local governments should develop the official website of the government with content that is always updated, well written, clear, and concise in order to meet the needs of users of information, and information that is easily accessible. Disclosure of information through the official website of the regional government can increase public and third-party trust in regional government. Regions in East Java Province have implemented a menu of TPAD content on the official website of the local government, but there are still a number of local governments that do not have the content menu.*

*The independent variables in this study are audit opinion, size of local government, and capital expenditure. The dependent variable used is the disclosure level of financial and non financial information. This study aims to analyze the effect of audit opinion, size of local government, and capital expenditure simultaneously and partially to the level of disclosure of financial and non financial information at the official site of local government in East Java Province 2015-2016.*

*The population in this study is the official site of local government in East Java Province in 2015-2016. Sampling technique using purposive sampling and obtained 42 data consisting of 21 sites of local government with two years time as sample in this research. Data analysis model used in this research is panel data analysis using Eviews version 9 software*

*The results show that audit opinion, size of local government, and capital expenditure have influence simultaneously to the level of disclosure of financial and non financial information at official site of local government in East Java Province. The partial audit opinion, size of local government, capital expenditure have no significant effect on the level of financial and non-financial disclosure on the official site of the local government in East Java Province.*

**Keywords :** *Audit Opinion, Size of Local Government , Capital Expenditure, Level of Disclosure of Financial and non-financial Information on Official Site of Local Government.*

---

## I. PENDAHULUAN

Setelah diberlakukannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi <sup>[1]</sup>UU No. 32 Th 2004 dan UU No. 25 Th 1999 menjadi <sup>[2]</sup>UU No. 33 Th 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengelolaan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat di daerahnya masing – masing. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat <sup>[3]</sup>(Handra & Maryati, 2009). Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola daerahnya. maka dari itu pemerintah bertanggung jawab mengungkapkan informasi mengenai informasi keuangan dan informasi non-keuangan yang nantinya informasi tersebut digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Pemerintah sebagai agent yang telah di berikan kewenangan untuk mengurus pemerintahan di daerah dan juga merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang juga ikut dalam pembiayaan terhadap pemerintah daerah. Salah satu media penyampain informasi tersebut adalah media elektronik (*e-government*) yaitu melalui situs resmi milik pemerintah daerah.. Hal tersebut didukung dengan <sup>[4]</sup>Peraturan Menkominfo No. 28 Tahun 2006 tentang penggunaan domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah. Pengungkapan informasi melalui situs resmi sangat efektif dan efisien bagi pengguna informasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan investor.

Pengungkapan informasi pemerintahan pada situs resmi diatur melalui <sup>[5]</sup>Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah secara berkala melalui dokumen tertulis dan situs resmi pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan publikasi <sup>[6]</sup>PP No 3 Tahun 2007 dan <sup>[7]</sup>Permendagri No 7A Tahun 2007 menyebutkan informasi yang harus diungkapkan Pemda melalui media elektronik adalah info penyelenggaraan pemerintahan daerah dan <sup>[8]</sup>PP No 6 Tahun 2008 menjelaskan selain info penyelenggaraan daerah yang harus diungkap oleh Pemda adalah hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Daerah di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan untuk membuat menu konten TPAD dalam situs resmi pemerintah daerah, namun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki menu konten tersebut. Situs resmi pemerintah daerah yang telah menyediakan menu konten ternyata juga masih ada yang belum

melakukan pengungkapan 12 item yang seharusnya diungkapkan. Salah satu item yang masih belum diungkapkan dalam situs resmi adalah laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan CALK.

Pengembangan situs resmi pemerintah bertujuan supaya masyarakat dapat memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan situs resmi pemerintahnya dengan isi yang selalu di *update*, ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, serta informasi tersebut mudah diakses.

Pada saat ini sudah banyak situs resmi pemerintah daerah yang dapat diakses dengan berbagai macam informasi dan tampilan. Tetapi masih belum maksimalnya pemanfaatan situs resmi pemda sebagai media pelaporan informasi keuangan dan non keuangan, menyebabkan keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan dalam beberapa informasi keuangan dan juga beberapa informasi non keuangan di dalam situs resmi pemerintah daerah. Motivasi untuk secara sukarela melaporkan informasi pemerintahan pada website bergantung kepada urgensi masing-masing pemda. Hal tersebut mengakibatkan informasi minimum dan layanan publik yang seharusnya disajikan tetapi tidak tersedia dalam situs resmi pemerintah daerah (situs resmi pemerintah daerah).

Opini Audit merupakan informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi seperti masyarakat, investor dan juga pemerintah. Untuk masyarakat dan investor opini audit sendiri berguna untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah mengenai kinerja dan kredibilitas Pemerintah Daerah. Bagi pemerintah opini audit digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Beberapa daerah di Jawa Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi hasil opini audit tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui langsung opini terhadap hasil kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah baik kabupaten ataupun kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situs pemerintah daerahnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menguji bagaimana pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

## II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

### A. E-GOVERNMENT

*E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah dengan tujuan mencapai *good governance*.

### B. PENGUNGKAPAN

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan, dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statemen keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan<sup>[9]</sup>(Swardjono, 2014:578)

### C. OPINI AUDIT

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan<sup>[10]</sup>(Masdiantini dan Erawati, 2016)

### D. UKURAN PEMERINTAH DAERAH

Menurut<sup>[11]</sup>Afransyah (2013) jumlah penduduk suatu di suatu daerah dapat dijadikan untuk mengukur ukuran pemerintah daerah dan juga tingkat kemajuan teknologi dan informasi di suatu daerah.

### E. BELANJA MODAL

Berdasarkan<sup>[12]</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) : “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

**F. METODOLOGI**

Populasi dalam penelitian ini adalah Situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 21 situs resmi pemerintah daerah/kabupaten dan kota yang terdiri dari 21 daerah dan dalam waktu dua tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Rumus regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan maupun Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ : Koefisien Regresi

X1 : Opini Audit

X2 : Ukuran Pemerintah Daerah

X3 : Belanja Modal

e : Error

**III. PEMBAHASAN**

**A. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**

Berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variable operasional:

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Observation	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	42	1,0000	0,0000	0,8095	0,3974
Ukuran Pemda	42	11,8343	14,8672	13,6449	0,7844
Belanja Modal	42	25,0313	28,2129	26,7293	0,6187
Tingkat Pengungkapan	42	0,4231	0,9231	0,7592	0,0927

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2019

Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki nilai rata-rata (*mean*) Tingkat pengungkapan yang lebih besar daripada standar deviasi yang berarti data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal memiliki mean yang lebih besar daripada standar deviasi yang berarti bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

**B. ANALISIS REGRESI DATA PANEL**

Rumus regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = -0.043947 - 0.026087X_1 + 0.004127X_2 + 0.029062X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah
- $\alpha$  : Konstanta
- X1 : Opini Audit
- X2 : Ukuran Pemerintah Daerah
- X3 : Belanja Modal
- e : *Error*

Nilai konstanta sebesar **-0.043947** menunjukkan bahwa jika variabel independen pada regresi yaitu Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal dianggap bernilai nol, maka nilai dari variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah adalah sebesar **-0.043947** satuan. Koefisien regresi Opini Audit sebesar **-0.026087** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Opini Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan menurun sebesar **0.026087** satuan. Koefisien regresi Ukuran Pemerintah Daerah sebesar **0.004127** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Ukuran Pemerintah Daerah sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar **0.004127**satuan. Koefisien regresi Belanja Modal sebesar **0.029062** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan Belanja Modal sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar **0.029062**satuan.

**C. UJI HIPOTESIS**

Uji hipotesis dilakukan dengan uji Langrange Multiplier. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F) berikut hasil uji secara simultan pada penelitian ini :

**Tabel 2.**  
**Hasil Pengujian Signifikansi *Common Effect Model***

Dependent Variable: PI  
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
 Date: 06/19/19 Time: 23:08  
 Sample: 2015 2016  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 21  
 Total panel (balanced) observations: 42  
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.043947	0.270641	-0.162381	0.8719
OPINI	-0.026087	0.016745	-1.557926	0.1275
UKPEM	0.004127	0.014443	0.285737	0.7766
KEMKEU	0.029062	0.015908	1.826932	0.0756

## Weighted Statistics

R-squared	0.306163	Mean dependent var	1.358714
Adjusted R-squared	0.251386	S.D. dependent var	0.814392
S.E. of regression	0.078525	Sum squared resid	0.234312
F-statistic	5.589289	Durbin-Watson stat	1.637003
Prob(F-statistic)	0.002818		

## Unweighted Statistics

R-squared	0.068182	Mean dependent var	0.759162
Sum squared resid	0.328227	Durbin-Watson stat	1.094052

Sumber: Hasil output Eviews versi 9 (data yang telah diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *prob (F-static)* adalah sebesar 0.002818 atau lebih kecil dari 5%, maka  $H_0$  ditolak, berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Informasi baik Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016).

**i. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan**

Variabel opini audit memiliki nilai koefisien regresi -0.026087 yang artinya opini audit memiliki pengaruh negatif dengan signifikansi sebesar 0.1275. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau  $0.1275 > 0.05$ , sehingga variabel opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi secara keseluruhan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berarti bahwa apabila opini audit mengalami kenaikan ataupun penurunan hal ini tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi di website pemerintah.

Menurut <sup>[13]</sup>Ade (2018) opini audit selain WTP tidak mengindikasikan bahwa kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah itu buruk karena kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak hanya di ukur dari hasil dari hasil laporan keuangan itu sendiri. Adanya kasus suap menunjukkan ke public bahwa opini audit WTP tidak menjamin bahwa pemerintah daerah lepas dari korupsi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>[14]</sup>Trisnawati dan Achmad (2014) yang menyatakan bahwa persepsi publik yang mulai berubah membuat opini audit tidak berpengaruh terhadap pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan melalui internet.

**ii. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan**

Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai koefisien regresi 0.004127 yang artinya ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dengan signifikansi sebesar 0.7766. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau  $0.7766 > 0.05$ , sehingga variabel ukuran pemerintah daerah memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi secara keseluruhan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Ukuran pemerintah daerah disini menggunakan proksi jumlah penduduk. Hal tersebut berarti bahwa apabila ukuran pemerintah daerah mengalami kenaikan atau penurunan maka tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan tidak akan berubah.

Hal ini juga sejalan dengan <sup>[11]</sup>Rahmad Dian Afryansah dan Hartanto (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penilitan yang dilakukan oleh <sup>[15]</sup>Uswatun Hasanah (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi di website.

**iii. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan**

Variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien regresi 0.029062 yang artinya belanja modal memiliki pengaruh positif dengan signifikansi sebesar 0.0756. Nilai signifikansi tersebut

memiliki nilai lebih besar dari 0.05 atau  $0.0756 < 0.05$ , sehingga variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi secara keseluruhan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berarti bahwa apabila belanja modal mengalami kenaikan atau penurunan maka tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan tidak akan berubah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>[16]</sup>Rora dan Dwi (2012) yang menyatakan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penelitian <sup>[17]</sup>Muhammad Hadis (2015) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara belanja daerah terhadap pengungkapan informasi di website pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian penelitian <sup>[18]</sup>Agus dan Dyah (2015), hasil penelitiannya menunjukkan variabel belanja daerah tidak terdapat hubungan signifikan positif antara belanja daerah dengan pengungkapan informasi keuangan daerah dan sejalan juga dengan penelitian <sup>[19]</sup>Yulia Yustikasari (2018) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan di website pemerintah daerah.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, secara simultan variable independen yang terdiri dari opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan. Sedangkan, secara parsial menunjukan hasil bahwa opini audit, ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan.

#### Daftar Pustaka :

- <sup>[1]</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- <sup>[2]</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- <sup>[3]</sup>Handra, H., & Maryati, S. (2009). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat*.
- <sup>[4]</sup>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
- <sup>[5]</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- <sup>[6]</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- <sup>[7]</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- <sup>[8]</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- <sup>[9]</sup>Suardjono. 2014. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- <sup>[10]</sup>Masdiantini, P. R. Dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14:1150-1182.
- <sup>[11]</sup>Afransyah, Rahmad Dian, Haryanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2, Nomor3, ISSN: 2337-3806
- <sup>[12]</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- <sup>[13]</sup>Idris, Ade L.M, Ni Ketut Surasni, M. Irwan (2018). *The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia*. *Int J. Eco. Res 2018*, Volume 9 i1, hal 62 – 74, ISSN: 2229-6158.
- <sup>[14]</sup>Trisnawati, Mya Dewi, Komarudin Achmad. 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. SNA 17 Mataram, Lombok 24-27 September 2014.

<sup>[15]</sup>Hasanah, Uswatun. (2016). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.

<sup>[16]</sup>Puspita, Rora dan Martiani Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah Daerah. Simposium Nasional XV. Banjarmasin 20-23 September 2012.*

<sup>[17]</sup>Hadis, Muhammad. (2015). *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012 - 2014)*.

<sup>[18]</sup>Setyaningrum, Dyah., Syafitri Febriani. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2 hal 154-170. Universitas Indonesia: Jakarta*

<sup>[19]</sup>Yustikasari, Yulia. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia)*. *Jurnal Profita Volume 11* hal 34-52. Universitas Mercu Buana Jakarta.